BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai suatu organisasi kekuasaan yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Ini menegaskan idealnya bahwa hukum menjadi konsep dalam mengatur dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan hukum terus mengalami kemajuan dan telah menempati posisi sentral dalam kehidupan kolektif manusia. Negara tidak lagi dipandang sebagai suatu kekuasaan yang absolut, di mana semua aparatur negara sampai dengan warga negara harus tunduk secara mutlak pada penguasa. Akan tetapi, sebaliknya negara harus dapat mengikuti serta menyesuaikan irama dengan semua komponen pembentuk negara. Negara hukum merupakan salah satu prasyarat agar negara benar-benar demokratis, dengan adanya teori pemisahan kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif memberikan warna baru dalam perkembangan ketatanegaraan, disisi lain pembagian kekuasaan bertujuan untuk menimalisir terjadinya otoritas negara yang berlebihan sehingga eksistensi negara sebagai pemegang kekuasaan yang berkewajiban memajukan, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara dapat terwujud.

Negara pada hakikatnya adalah kendaraan untuk mewujudkan keadilan tinggi bagi masyarakat yang berlandaskan kepada hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Jean Jaques Rousseau mengemukakan Negara adalah

perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka. Dapat diartikan negara hasil dari kesepakatan (*consesnsus*) bersama dari rakyat sebagai makhluk sosial yang ingin hidup bebas berdampingan satu sama lain. Kehidupan bernegara ini mendorong manusia ingin hidup dalam suatu pergaulan sosial yang lebih besar yaitu negara. Dengan berbagai aturan yang harus ditaati oleh masyarakat menjadikan hukum sebagai instrumen yang mampu mengelolah dan mengatur dinamika kehidupan sosial serta mempermudah interaksi manusia sebagai warga negara yang tertib, aman dan nyaman. Bahkan lebih dari pada itu negara harus mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Negara dalam hal ini harus menjadi sarana bagi warga negara untuk mencapai tujuan-tujuan hidup dalam kehidupan bernegara dan berbangsa seperti menjamin keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Konsep negara hukum sebagaimana disebutkan di atas dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem fungsional dan berkeadilan dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur serta dibina dalam mengembangkan budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakan (*law enforcing*), sebagaimana mustinya ini harus dimulai dari konstitusi sebagai hukum yang paling tertinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*) dibentuk pula mahkamah

konstitusi yang berfungsi sebagai “*the guardian*” dan sekaligus “*the ultimate interpreter of the constitutions*”.¹

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu negara agar tetap merasakan kenyamanan dan ketertiban sosial maka dibutuhkan hukum yang dapat menjadi panglima sebagai pisau menegakan keadilan dan kebenaran di dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Akan sangat ironis apabila kehidupan sosial masyarakat tanpa ada peraturan yang mengatur ini akan mengakibatkan kekacauan (konflik) horisontal sehingga dibutuhkan peraturan yang dapat mengatasi kekacauan tersebut. Hukum adalah salah satu instrumen kelambagaan yang bisa mejadi solusi atas ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Dapat diartikan bahwa hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh lembaga negara untuk menbatasi tingkah laku manusia agar dapat dikontrol. Dengan demikian hukum menjadi aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kelembangaan, Sebagaimana tujuan hukum yang mempunyai sifat universal seperti terciptanya ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga neraga yang berfungsi menegakkan hukum sebagaimana terdapat pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum,

¹ Asshiddiqie Jimly. *Konsep Negara Hukum* . (online). Hppt://www.google.co.id/. Diakses 15 september 2015

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Eksistensi kepolisian dalam kehidupan masyarakat sangat penting dengan peranannya sebagai penegak hukum diharapkan dapat terciptanya kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terlaksananya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Pasal 13 ditentukan tujuan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²

Tugas pokok Kepolisian sebagaimana disebutkan tidak lain untuk menjamin terciptanya situasi kondusif bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kepolisian dapat diartikan sebagai pelayan bagi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi sangat berbeda di mana lembaga kepolisian terkadang apatis terhadap masalah-masalah sosial di dalam masyarakat. Hal serupa juga terjadi pada kepolisian sektor dumoga timur dalam melaksanakan peranannya sebagai penegak hukum masih mengalami kesulitan cukup signifikan hingga upaya menanggulangi perkara hukum tidak begitu efektif dan efisien, Seperti konflik antar desa di daerah dumoga timur sudah sejak lama terjadi.

² Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Pasal 2, 4, 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Contohnya desa Tambun dan kelurahan Imandi realitasnya kedua desa tersebut sejak tahun 2004 sering terlibat dalam konflik antar desa, selain itu juga terdapat desa-desa lain yang sering terlibat dalam konflik antar desa (TARKAM) seperti Desa Tonom dan Desa Ibolian, Desa Siniung Induk dan Desa Siniung Satu, Desa Dumoga dan Desa Siniung, Desa Mogoyungung dan Desa Imandi. Sampai dengan saat ini konflik antar desa (TARKAM) yang terjadi di wilayah dumoga timur disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pergaulan anak muda yang terjerumus ke dalam dunia minuman keras (miras) sehingga mengakibatkan banyak anak muda yang kurang memahami etika dan moral dalam hidup bermasyarakat. Selain itu kurangnya faktor pendidikan dan lapangan kerja juga mempengaruhi pola berfikir dan karakter sehingga mengakibatkan sangat mudah melakukan perbuatan tidak baik yang dapat menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat.

Konflik antar desa yang seringkali terjadi di wilayah Kecamatan Dumoga Timur hingga sekarang belum mendapatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sekalipun terdapat upaya menyelesaikan konflik sifatnya menimalisir konflik. Kesulitan ini dapat berasal dari aparat penegak hukum, ketidaksiapan undang-undang, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berperan serta untuk mencegah terjadinya konflik serta berkurangnya profesionalisme dan kinerja polisi sebagai penegak hukum dapat mengurangi reputasi kepolisian negara republik indonesia menjadi negatif dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian kian memudar.

Sehingga dari permasalahan di atas memotivasi calon peneliti untuk melakukan penulisan hukum ini. Dengan demikian, calon peneliti mengangkat judul **“Analisis Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Peran Kepolisian Dalam Menyelesaikan Kasus Konflik Antar Desa (Studi Kasus Polsek Dumoga Timur)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang dikemukakan di atas. Maka calon membatasi masalah yakni dengan mengangkat tema penyelesaian kasus konflik antar desa di daerah dumoga timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian Sektor Dumoga Timur dalam menyelesaikan kasus konflik antar desa di Kecamatan Dumoga Timur ?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat Kepolisian Sektor Dumoga dalam penyelesaian kasus konflik antar desa di Kecamatan Dumoga Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui serta memecahkan persoalan yang dikemukakan di atas, adapun tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja dan profesionalisme kepolisian sektor dumoga timur sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pelaksana penegak hukum.
2. Untuk mengetahui faktor –faktor apakah yang menjadi kendala kepolisian dumoga timur dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ilmiah ini, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh, yakni manfaat teoritis serta manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, peneliti dapat memperoleh ilmu pengetahuan serta memperdalam wawasan mengenai peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bertujuan menegakkan keadilan berlandaskan pada kebenaran serta berfungsi menjamin perlindungan, pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia serta menciptakan ketertiban dan ketentraman didalam masyarakat. Pengetahuan mengenai tugas, fungsi dan wewenang lembaga hukum negara, yang diterangkan secara teoritis dapat juga digunakan dalam pengembangan teori. Selain itu juga hasil penelitian ini bisa digunakan menjadi literatur dalam pembacaan masalah perkara pidana serta pengembangan ilmu pengetahuan baik dalam bidang kepolisian.

b. Manfaat Praktis

Pada prinsipnya penelitian ini akan menghasilkan suatu solusi permasalahan dalam dinamika kehidupan sosial. Disisi lain dapat juga digunakan untuk pengembangan dan memperdalam ilmu pengetahuan bagi mahasiswa hukum terlebih mereka yang mengambil bidang hukum pidana. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perbaikan kinerja kepolisian serta dapat juga digunakan sebagai bahan sosialisasi bagi masyarakat dalam mengembangkan dan mening